

Komunikasi Politik: Pertarungan Kepentingan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Covid-19

Political Communication: The Battle Between The Interests of The Central Government and Regional Government in Dealing with Covid-19

Nadia Febiana

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

E-mail: nadiafebiana@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 akhirnya menaklukkan hampir di seluruh negara di dunia. Tidak dapat dipastikan kapan pandemi ini berakhir. Sehingga, menimbulkan kekhawatiran masyarakat akibat dari situasi ini. Di samping itu, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam menanggulangi bencana wabah Covid-19. Artikel ini menganalisis komunikasi politik pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan memakai kajian literatur dan mencerminkan teori komunikasi klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19. Adanya diskursus hubungan pemda dan pusat dalam merespons masalah yang mendunia ini. Dalam situasi saat ini peran pemerintah sangat penting untuk menanggulangnya. Namun, realitanya pemerintah dinilai belum siap dalam mengatasi hal ini. Kerap kali ditemukan miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pusat serta terjadinya tumpang tindih kebijakan dan kesimpang siuran informasi yang kemudian akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kajian ini berkesimpulan bahwa buruknya komunikasi politik pemerintah serta hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Sehingga hal ini dibutuhkan perbaikan komunikasi politik pemerintah agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

Kata Kunci: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komunikasi Politik, Covid-19

ABSTRACT

The covid-19 pandemic finally conquered most of the world's countries. It is uncertain when this pandemic will end. So, it raises public concern as a result of this situation. In addition, the government needs special attention in addressing the covid-19 outbreak of the plague. This article analyzed government political communications in the case of covid-19. The research methods used are qualitative methods using literary studies and reflect classic communication theories. The study was to learn the political communication between the local government and the central government in dealing with the covid-19 pandemic. There is a custom-centered, mentor-relationship disc in responding to this worldwide problem. In today's situation the role of government is critical to address it. In reality, though, governments are not prepared to deal with this. Miscommunication between local and central governments is often found and there is a overlap in policy and a mix of information that would then generate public distrust of the government. The study has concluded that poor government political communications and intergovernmental and inter-governmental relations related to covid-19 management

in Indonesia. This requires improving the government's political communications to prevent public uproar.

Keywords: *Central Government, Local Government, Political Communication, Covid-19*

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas mengenai komunikasi politik pemerintah daerah dan pusat di awal pandemi Covid-19 muncul di Indonesia. Covid-19 atau yang sering kali disebut dengan virus corona adalah penyakit menular yang bermula di Wuhan, Cina, pada Desember 2019, yang disebabkan oleh virus corona. Pada bulan Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 resmi menjadi pandemi sebagai wabah penyakit yang tersebar luas di seluruh dunia (WHO-Indonesia, 2020).

Virus ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian secara cepat. Presiden Joko Widodo kemudian menyelenggarakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada umum tentang kebijakan yang akan diambilnya dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia merespon keadaan ini dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan ini merupakan adalah bentuk sikap pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan dipilihnya kebijakan tersebut, maka Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Pemda tidak boleh menjalankan kebijakannya secara masing-masing di daerahnya, hal ini yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan dari Pemerintah Pusat. Seperti halnya ketika penerapan kebijakan *lockdown* di beberapa daerah Indonesia. Sedangkan, menurut UU No. 6 Tahun 2018 bahwa penerapan kebijakan *lockdown* adalah wewenang Pemerintah Pusat (Aulia, 2020).

Di samping itu, pada bulan Maret 2020, kasus virus Covid-19 di Indonesia pun telah terdeteksi. Jumlah kasus positif pun semakin hari kian bertambah. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penambahan kasus Covid-19 masih terus meningkat di bulan Januari 2021 (Moerti, 2020). Hal ini tentu meresahkan masyarakat.

Artinya pemerintah belum sigap dalam menanggulangi permasalahan. Masalah paling utama dari komunikasi pemerintah menangani bencana Covid-19 yaitu kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan, minimnya sosialisasi informasi terkait

beberapa isu, kurang akuratnya data dan informasi, dan rendahnya kepercayaan publik. Dan salah satu kasus dari permasalahan kurangnya efektifitas komunikasi ini diantaranya yaitu tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah (Suni, 2020)

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar selalu tanggap dan bergerak cepat terhadap kondisi masyarakatnya. Komunikasi politik yang digunakan oleh kepala daerah dengan masyarakat menjadi salah satu komponen yang penting sehingga mampu memastikan keberhasilan program pencegahan penyebaran Covid-19 (Alkomari, 2020). Sesuai dengan penegasan dari Presiden Joko Widodo bahwasanya pemerintah daerah seharusnya tidak boleh menerapkan kebijakan secara masing-masing yang tidak selaras dengan protokol kesehatan. Pihak swasta serta Pemerintah daerah harus patuh pada kebijakan PSBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Padahal, sejak awal terjadinya penyebaran virus corona di Wuhan, pemerintah pusat di Indonesia tidak mengumumkan apapun kepada publik. Bila dipandang dari berbagai daerah bahwa para pemimpin daerah tampaknya lebih waspada dalam menanggapi permasalahan Covid-19 ini. Sehingga dengan hal itu terlihat kurang terkoordinasi dalam perumusan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan berbagai kebijakan tumpang tindih yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah taktis ataupun melaksanakan komunikasi atau penyampaian informasi kepada publik terkait berita ataupun data yang berkaitan dengan Covid-19 (Sainuddin, 2020). Secara universal, komunikasi politik biasa berhubungan dengan pembicaraan mengenai politik maupun penyampaian pesan politik secara verbal atau non verbal yang bisa mempengaruhi masyarakat ataupun pemerintah di dalam sistem politik. Atau pun secara sederhananya bisa dikatakan jika komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang beisikan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menghasilkan penjelasan makna bersama (Susanto, 2013).

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan problematika kebijakan di era pandemi ini adanya diskursus penanganan wabah virus Covid-19 oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kemudian hal ini membuat ketidaksesuaian arah kebijakan dan politik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak

mengerti akibat dari komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah.

Situasi ketika minimnya kesiapan pemerintah pusat dalam menanggapi bencana Covid-19 yang telah datang ke Indonesia, kemudian diikuti dengan timbulnya kesimpang siuran informasi, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yang kemudian memunculkan bermacam respon negatif di masyarakat. Seperti halnya memborong bahan makanan di pasar sebagai persediaan ketika *lockdown*, menimbun masker, adapula yang memborong cairan disinfektan karena khawatir akan kehabisan stok di pasaran. Hal tersebut merupakan bentuk kejadian yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dengan demikian, aksi di dalam kejadian tersebut dinilai sebagai respons pemerintah yang tidak mampu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah sanggup menangani masalah Covid-19 (Katharina, 2020).

A. Teori Komunikasi Klasik

Komunikasi pemerintahan disebut juga sebagai komunikasi politik. Menurut Maswadi Ruf sebagai seorang pakar politik bahwa komunikasi politik merupakan objek kajian ilmu politik sebab ditandai dengan adanya pesan-pesan politik yang disampaikan dalam proses komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan politik pemerintahan, negara, serta kegiatan komunikator dalam letaknya sebagai pelaku politik (Hariyanto, 2019). Menurut Lasswell, definisi politik yaitu siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana cara memperolehnya (*who gets what, when, how*).

Di samping itu, politik pun dapat dimengerti sebagai pembagian nilai-nilai oleh banyak orang yang memiliki wewenang, kekuasaan, sampai pemegang kekuasaan (Ardial, 2010). Proses komunikasi massa dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan *who* (siapa), *say what* (berkata apa), *in which channel* (melalui saluran apa), *to whom* (kepada siapa), dan *which what effect* (dengan efek apa) (Fachrudin, 2020). Dalam komunikasi politik menurut Kantaprawira, berfokus pada kegunaannya dimana untuk mempertemukan pikiran politik yang berlangsung di masyarakat. baik itu dari intra golongan, asosiasi, institusi, maupun sektor di dalam sektor kehidupan politik pemerintah dengan kehidupan politik masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pola pemikiran, gagasan maupun ide ataupun usaha dalam memperoleh pengaruh, hanya dengan melalui komunikasi bisa tercapai segala sesuatu yang dikehendaki, sebab sejatinya segala ide

ataupun pikiran dan kebijakan (*policy*) tentu ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, hal inilah yang disebut dengan proses komunikasi.

B. Teori Negara dan *Welfare State*

Pada dasarnya, negara menurut Roger F. Saleau adalah suatu media atau otoritas yang mengawasi dan mengontrol isu-isu umum dan kehidupan warga negara. (Zakky, 2018). Dari pemikiran tersebut bahwa untuk itu semestinya mengetahui dan mencari lebih jauh tentang tujuan dari negara tersebut, supaya bisa dimengerti bagaimana terbentuknya negara dan akan kemana cita-cita yang ingin diwujudkan maka perlunya orientasi dan motivasi. Sudah menjadi sebuah bentuk hal yang sangat dicita-citakan oleh semua negara yaitu bisa memberikan rasa aman dan perlindungan, serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Juaningsih et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian literature dan bertujuan untuk memahami secara mendalam masalah komunikasi politik pemerintah dan daerah yang dianggap belum jelas karena masih terdapat kesimpang siuran informasi. Penelitian ini menggunakan sumber data dari data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data dari situs web yang valid, jurnal akademisi, hasil penelitian, makalah, buku dan sumber kredibel lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dalam teknis analisa data penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan guna memberikan gambaran mengenai kondisi serta situasi yang terjadi sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Miskomunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Ketika virus Covid-19 menyerang seluruh dunia, berbagai kesimpang siuran tentang informasi terjadi bahkan banyak pula tersebar berita bohong atau *hoax* (Sainuddin, 2020). Dari awal virus ini muncul di Wuhan kemudian menyebar ke penjuru dunia, data mencatat jumlah kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi kurang lebih mencapai 30 juta kasus (Alwi, 2020). Sedangkan, pada tanggal 2 Maret 2020 negara Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang tertular penyakit Covid-19 dari total 69 negara yang terjangkit virus corona.

Pada saat itu Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa virus yang berasal dari Wuhan ini menjangkiti dua WNI tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat (Fadli, 2020). Sejak saat itulah, Presiden Jokowi menyatakan keadaan darurat kesehatan terkait dengan wabah virus ini di tanggal 31 Maret 2020, yang dapat berpengaruh ke berbagai sektor aktivitas perekonomian maupun sosial masyarakat (Kurniawan, 2020). Penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia pun semakin hari dari waktu ke waktu akan terus bertambah.

Pada masa pandemi ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi kasus penyebaran virus corona. Maka dari itu, komunikasi merupakan salah satu tolak ukur terpenting bagi pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut. Pemerintah dalam menyampaikan informasi seharusnya sesuai dengan pemahaman masyarakat secara umum (Sainuddin, 2020).

Sedangkan itu, di dalam penerapan kebijakan penanganan Covid-19 masih terjadinya miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini banyak pemda yang mengambil langkah sendiri dalam penerapan kebijakan di daerahnya masing-masing. Padahal, tercantum di pasal 11 dan 12 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah urusan pemerintahan harus masuk ke dalam urusan pemerintahan yang disengketakan menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten/provinsi.

Oleh karena itu, dengan menangani kasus corona pemda beranggapan saat virus ini telah masuk ke dalam wilayahnya, maka pemerintah daerah mesti menentukan penanganan yang tepat (Katharina, 2020). Dalam menangani penyebaran Covid-19 banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak transparan, tidak konsisten dan banyak ditemukan tarik menarik komunikasi, terutama antarainstitusi negara yang berwenang menangani permasalahan ini, serta antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Halim, 2020). Pada saat ini, Indonesia sedang ada di dalam masa hukum tata negara darurat, sehingga secara *de facto*, hukum nasional di Indonesia menjadi tidak berlaku seperti dalam kondisi normal.

Dalam pelaksanaannya, hukum darurat ini memperbolehkan untuk mengesampingkan kewenangan otonomi daerah serta memperbolehkan negara dalam menyelenggarakan segala sesuatu di luar prinsip hukum umum. Namun, dalam penerapannya keadaan status darurat ini menampik kemampuan dan pengetahuan

pemerintah daerah dalam proses penanganan pandemi. Pemerintah daerah yang berperan sebagai ujung tombak penanggulangan pandemi malah bergantung pada keputusan pemerintah pusat dan tak bisa membuat keputusan sendiri.

Banyak pemerintah daerah yang terkekang oleh pemerintah pusat pada masa darurat ini. Dari data yang didapatkan di Tirto.id, bahwasanya terkait dengan informasi mengenai perkembangan penyebaran virus corona di negara Indonesia mengalami tumpang tindih antara satu *Actor State* dengan lainnya. Pertama, informasi yang berbeda soal usia dua pasien positif Covid-19 yang sembuh pada 12 Maret 2020 lalu di RSUP Persahabatan. Kedua, pada tanggal 13 Maret 2020 data perbedaan angka positif Covid-19 antara Yuri dengan Presiden Jokowi. Ketiga, adanya tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten terkait dengan jumlah pasien serta riwayat pasien. Keempat, merupakan puncak dari miskomunikasi antara Pemda dengan Pemerintah Pusat terjadi dalam pemberitahuan pasien yang meninggal karena kasus positif corona ke-25 di Bali pada tanggal 10 Maret 2020.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali hanya mengetahui bahwa pasien tersebut Warga Negara Asing dari Inggris sebagai *suspect* atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kelima, terkait informasi mengenai ketersediaan alat pelindung diri yang merupakan pakaian hazmat tidak diketahui oleh petugas medis daerah. Terkait hal tersebut, Direktur SAFEnet yaitu Damar Juniarto mengatakan bahwa yang menjadi penyebab kepanikan tersebut salah satunya ialah tidak adanya saluran informasi yang utama dan resmi tentunya dari pemerintah yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat (Amali, 2020).

Dalam menangani virus corona ini, adanya *disharmonisasi* antara kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dengan kebijakan Pemerintah daerah. Perbedaan itu bermula ketika di beberapa daerah mulai menetapkan *Lockdown* (merupakan karantina wilayah yang diterapkan di suatu wilayah atau daerah tertentu untuk mencegah perpindahan orang baik itu keluar masuk wilayah tersebut untuk maksud dan tujuan yang mendesak) tetapi, pemerintah pusat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Istilah PSBB yang di terapkan di sejumlah daerah dan kota di Indonesia sempat berlaku dengan melakukan *phsycal distancing* yaitu menjaga jarak fisik minimal 2 meter antar individu, menghindari aktivitas kerumunan sebelum era *new normal* berlaku.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahh pusat ini masih menjadi suatu keganjilan dalam publik. Sebab, seruan yang dibuat masih bersifat tak mengikat. Seolah

tak ingin meruginya Pemerintah pusat jika tidak diterapkannya *lockdown* (Juaningsih et al., 2020). Menurut Hendri Satrio selaku pengamat politik menilai bahwa ada kesan saling berkompetisi antara pemerintah pusat dan daerah serta adanya komunikasi yang tidak lancar di dalamnya. Jika terjadinya kompetisi seperti itu artinya ada koordinasi dan komunikasi yang salah. Menurutnya, wajar jika Presiden Joko Widodo menegur kepala daerah karena melangkahi kewenangan pusat dalam mengatasi Covid-19.

Namun, di samping kepala daerah melakukan hal itu adanya pemerintah pusat yang dianggap lamban dalam mengambil keputusan. Sebenarnya, penanganan virus corona ini bisa berjalan dengan baik jika komunikasi keduanya lancar dan tugas Kementrian Dalam Negeri dapat berjalan dengan baik sebagai penyampaian informasi ke daerah-daerah (Wardhany, 2020). Di samping itu, pemerintah terlihat gagap dalam mengatasi Covid-19.

Misalnya, penerapan *social distancing* yang kemudian diganti menjadi *psysical distancing*. Ditambah kontroversi atas pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi telah menyebutkan bahwa virus Covid-19 tidak tahan dengan cuaca panas. Melihat hal tersebut bahwa tidak terlihat jelasnya visi dan misi pemerintah pusat dalam menghadapi kebijakan: apakah mendahulukan kepentingan ekonomi, investasi atau kemanusiaan.

Masalah miskomunikasi dalam konteks pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagai studi kasus jika mencontoh dari teori komunikasi klasiknya Harold D. Lasswell tentang *who* (siapa) yang bertindak sebagai komunikator politik. Dan Nimmo Menurut pandangannya, komunikator politik merupakan yang memegang peranan penting. Dalam konteks penanggulangan bencana Covid-19, dalam hal ini Presiden Joko Widodo beserta menteri-menterinya berperan sebagai komunikator yang menentukan efektivitas kebijakan serta respon komunikasi. Dan apabila jika komunikator politik tersebut menjalankan kesalahan fatal, maka publik bisa menjadi tidak percaya, apatis, dan antipati. Apabila komunikator telah mendapatkan ketidakpercayaan dari publik (*distrust*), maka akan sulit membentuk dan mempengaruhi publik sebagaimana yang diinginkan.

Dampak dari Buruknya Komunikasi Politik Pemerintah di Masa Pandemi

Sejak awal masuknya wabah Covid-19 ke Indonesia, pemerintah dinilai lamban dalam memperhitungkan dampaknya. Selain itu, di awal pandemi juga terkesan saling lempar antar lembaga pemerintah. Kepala daerah memunculkan kesan ketidakseragaman Pusat-Daerah dan cenderung bertindak sendiri. Seharusnya pemerintah pusat bertindak

preventif, namun justru pada situasi ini malah mengambil tindakan yang dinilai tidak responsif.

Akibatnya Pemda mengambil langkah inisiatif guna dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerahnya serta melaksanakan protokol Covid-19. Tindakan ini mendapat peringatan dari Pemerintah Pusat sebab dianggap telah melampaui Pusat. Publik pun menilai adanya perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta tidak mempunyai desain kebijakan penanganan pandemi.

Disi lain, dalam memberikan informasi kepada publik, terlihat kementrian yang seolah-olah bergerak sendiri tanpa adanya panduan solid. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tenang dan tertib pada tahap awal tanggap darurat Covid-19 sejauh ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masyarakat selalu dihantui dengan kepanikan, kebingungan serta kesimpangsiuran informasi terutama pada masa awal pandemi virus corona di Indonesia.

Misalnya yang pertama, munculnya *rush (panic buying)*, membeli barang secara besar; kedua, terjadi stigma dalam masyarakat serta *bullying* terhadap pasien positif Covid-19 dan keluarganya; ketiga, banyak masyarakat yang protes akibat penerapan PSBB; dan yang keempat adalah terjadinya penimbunan alat kesehatan, seperti masker (Fadhil, 2020). Terlihat adanya ketidakkonsistenan atau ketidaktegasan antara tindakan dan ucapan pemerintah. Fenomena tersebut membuktikan bahwa terdapat proses komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang masih meragukan penjelasan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, sekalipun pemerintah sudah berkali-kali menyampaikan kesiapannya (BBC News Indonesia, 2020).

Permasalahan terkait kurang akuratnya informasi dan data contohnya pada data kematian yang tidak sesuai dengan panduan WHO (Arif, 2020). Di samping itu, data mengenai bantuan sosial pun dinilai belum akurat. Kerumitan yang terjadi di dalam bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan pusat kenyataannya tidak selaras dan bersatu pada pemerintah daerah.

Data yang berada di daerah tidak sejalan dengan data di pusat. Akhirnya, banyak terjadi gejolak di daerah. Adapun sebagian warga yang memiliki kemampuan ekonomi menengah malah mendapat bantuan, padahal masyarakat yang benar-benar miskin tidak dapat bantuan sosial (Pratikno, 2005). Problematika terhadap kurangnya sosialisasi serta

rendahnya kepercayaan publik mengakibatkan banyak permasalahan misalnya penolakan *rapid test* serta fenomena pengambilan paksa jenazah yang terpapar positif Covid-19 (Katharina, 2020).

Koalisi Masyarakat Sipil beropini bahwa *central government* terlalu memberi bagian yang besar kepada permasalahan ekonomi dari pada pandemi Covid-19. Indonesia mempunyai riwayat manajemen informasi dalam publik yang sedikit memadai selama masa darurat kebencanaan. Masyarakat banyak yang mengambil jalan alternatif sendiri dengan cara saling membantu antar sesamanya ketika pemerintah terbilang lambat dalam mengatasi penyebaran virus yang sangat cepat ini (Mantalean, 2020).

Pemerintah daerah tampak cemas terkait penanganan pandemi ini. Walaupun pemerintah pusat memberikan standar, norma, kriteria, dan pedoman dalam penanganan Covid-19, Tetapi permasalahan yang dihadapi kerap kali berpatokan pada pemerintah daerah. Berawal ketika dalam penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di rumah sakit daerah, permasalahan sosial yang muncul akibat pandemi, masyarakat yang terdampak, semua ini terjadi di daerah.

Di samping itu, ruang gerak pemerintah daerah pun terbatas dikarenakan pengaturan terkait penanganan pandemi virus corona menitikberatkan pada kebijakan pemerintah pusat. (Pratikno, 2005). Bahwasanya, komunikasi yang efektif akan menghasilkan respon yang positif yaitu berbentuk tindakan dari masyarakat yang mendukung bermacam wujud kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, di dalam keadaan pandemi saat ini adanya kebijakan pemerintah yang berupa penerapan protokol kesehatan.

Dengan selalu melakukan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini mendapat respon positif dari masyarakat karena penerapan protokol kesehatan ini dijalankan secara merata di semua wilayah di Indonesia, berbeda halnya dengan PSSB dan *lockdown* pada masa awal masuknya virus corona di Indonesia. Dengan demikian, komunikasi politik membutuhkan kerjasama strategis dari berbagai elemen yang bertujuan untuk mempercepat penyebarluasan informasi pada masyarakat dan mengakomodasi masukan serta respon dari masyarakat tentang kebijakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Yang paling penting pada saat ini adalah masyarakat dapat memahami apa yang dilakukan pemerintah. Selain itu, komunikasi pemerintah yang efektif dapat membuahkan kepercayaan dari publik.

KESIMPULAN

Pandemi virus Covid-19 kerap menimbulkan diskursus terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menanggapi permasalahan yang menglobal ini. Oleh karena itu, pandemi ini bukanlah persoalan yang mudah untuk semua negara di dunia serta membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak. Dalam situasi darurat bencana Covid-19 ini sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menanggulangnya.

Namun, kenyataannya, pemerintah belum siap dalam mengatasi persoalan ini, masih banyak sekali kesimpang siuran informasi serta miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adanya ketidakpastian para aktor politik dalam membuat kebijakan. Urusan penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam konteks prinsip desentralisasi alih-alih sudah menjadi kegamangan pemerintah dalam menanggapi wabah virus ini.

Maka dari itu dengan melihat kejadian tersebut seharusnya pemerintah pusat lebih fokus dalam menangani Covid-19. Namun, dengan adanya ketimpangan dengan kurangnya koordinasi dan miskomunikasi politik antar pemerintah pusat dan daerah menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Meminjam kerangka berpikirnya Van Horn dan Van Mater bahwa masyarakat yang menjalankan (*implementors*) harus memahami apa yang menjadi standar sasaran. Kebijakan yang dibuat oleh aktor politik yaitu pemerintah.

Mereka yang bertanggung jawab atas standar dan tujuan kebijakan, oleh karena itu haruslah mengkomunikasikan informasi ini kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi politik yang disampaikan harus konsisten dan berasal dari sumber informasi yang sama-sama beragam. Jika tidak adanya kejelasan, seperti tidak ada konsistensi terhadap suatu kebijakan terkait penanggulangan Covid-19, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan sulit agar dapat dicapai.

Dengan demikian, harapan dari implementasi kebijakan yang efektif sangat dipastikan oleh komunikasi kepada para *implementors* secara tepat dan sesuai. Selain itu, koordinasi komunikasi antara pusat dan daerah pun harus selaras dan tidak boleh adanya tumpang tindih satu sama lain. Sehingga, dengan demikian kesalahan akan semakin diminimalisir, begitupun sebaliknya.

Peran pemerintah tentu selalu menjadi yang terpenting, terlebih dalam rangka mengkomunikasikan beragam isu dan kebijakan serta mitigasi dalam mengatasi pandemi.

Akurasi, konsistensi, efektifitas, penyampaian dalam bahasa atau pesan, serta transparansi informasi dan data, merupakan hal terpenting dalam komunikasi politik di masa krisis pandemi Covid-19 ini. Sehingga dibutuhkannya komunikasi yang merupakan pilar kehidupan agar menjaga masyarakat supaya tidak panik. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus sama-sama berperan dalam penyampaian informasi yang tepat agar masyarakat pun patuh terhadap protokol Covid-19 yang nantinya akan menimbulkan ketentraman serta keamanan di masyarakat.

REFERENCE

- Alkomari. (2020). Analisis Komunikasi Krisis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menghadapi Pandemi Covid-19. *Journal of Strategic Communication*, 11(1), 4.
- Alwi, V. A. P. (2020). *Alwi, V. A. P. penyakit menular dan covid-19*.
- Amali, Z. (2020). *Merekam Sepekan Misinformasi Corona Antara Pemerintah RI & Pemda*. Tirto.Id. <https://tirto.id/merekam-sepekan-misinformasi-corona-antara-pemerintah-ri-pemda-eFgX>
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. PT Indeks.
- Aulia, S. T. (2020). *Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan?* <https://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>
- Fachrudin, A. (2020). *Analisis Komunikasi Penanganan Covid-19*. Akurat.Co. <https://akurat.co/news/id-1072784-read-analisis-komunikasi-penanganan-covid19>
- Fadhal, S. (2020). Komunikasi publik di tengah krisis: tinjauan komunikasi pemerintah dalam tanggap darurat pandemi Covid-19. *Media, Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19*, 1–25. <https://eprints.uai.ac.id/1469/>
- Fadli, R. (2020). *Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*. Halodoc.Com. <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>
- Halim, D. (2020). *Pemerintah Pusat Dinilai Harus Membantu Pemda dalam Penanganan Covid-19*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/13/13563521/pemerintah-pusat-dinilai-harus-membantu-pemda-dalam-penanganan-covid-19?page=all>
- Hariyanto, E. (2019). Komunikasi pemerintah dan efektivitas kebijakan. *Kemenkeu Learning Center, 2005, 2005–2007*. <https://klc.kemenkeu.go.id/pusku-komunikasi-pemerintah-dan-efektivitas-kebijakan/>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, (6)7. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Katharina, R. (2020). Relasi Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19. *INFO Singkat*, xii(5), 25–30. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret-2020-221.pdf

- Kurniawan, S. (2020). *Pemerintah pusat dan daerah tidak kompak dalam menangani pandemi, akibatnya penanganan jadi lambat*. The Conversation. <https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam-menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat-139038>
- Mantalean, V. (2020). *Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Buruknya Komunikasi Pemerintah Tangani Covid-19*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/13/17453901/koalisi-masyarakat-sipil-soroti-buruknya-komunikasi-pemerintah-tangani?page=all>
- Moerti, W. (2020). *Data Terkini Covid-19 di Indonesia Januari 2021*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-januari-2021.html>
- Pratikno. (2005). *Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah*. 37–57.
- Sainuddin, I. H. (2020). *Komunikasi Publik di Masa Pandemi Covid-19*.
- Suni, N. S. P. (2020). *Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Info Singkat Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(15), 25–30.
- Susanto, E. H. (2013). *Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 163–172. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6>
- Wardhany. (2020). *Seperti Ada Komunikasi yang Tak Lancar dalam Penanganan COVID-19*. Voi.id. <https://voi.id/berita/4315/seperti-ada-komunikasi-yang-tak-lancar-dalam-penanganan-covid-19>
- Zakky. (2018). *Pengertian Negara Menurut Para Ahli dan Definisinya Secara Umum*. zonareferensi.com. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-negara/>